



Laporan Berkelanjutan PT. BPR NTB (Perseroda) Tahun Buku 2023

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51 / POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, PT. BPR NTB (Perseroda) merespons kebijakan tersebut dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT. BPR NTB (Perseroda) Tahun 2024 sebagai fondasi dan landasan strategik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan Bank.

PT. BPR NTB (Perseroda) sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ingin berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. BPR sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) melalui dana yang dihimpun dalam bentuk DPK (Tabungan dan Deposito) dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pembiayaan, maka PT. BPR NTB (Perseroda) berkewajiban dalam membiayai debitur secara selektif dengan menghindarkan diri pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan juga yang kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam keterkaitan positif ini (*positive linkage*), BPR Go Digital menyadari pentingnya isu pengelolaan Keuangan Berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *People* (Sosial), *Planet* (Lingkungan) dan *Profit* (Ekonomi) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) atau ESG (*Environmental, Social and Governance*).

PT. BPR NTB (Perseroda) berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) agar dapat secara efektif mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) untuk periode 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan atau periode 2024 - 2028 di mana sesuai dengan kategori BPR modal inti kurang dari Rp. 50 milyar pertama kali menyusun RAKB pada tahun 2023 dan selanjutnya pada tahun 2024 mulai mengimplementasikannya. Rujukan yang digunakan sebagai acuan PT. BPR NTB (Perseroda) dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu POJK Nomor 51 / POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan/ atau Pedoman Teknis bagi Bank terkait implementasi Peraturan OJK Nomor 51 /POJK.03/2017.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. STRATEGI BERKELANJUTAN	2
B. IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN.....	3
1. Kinerja Ekonomi	3
2. Kinerja Lingkungan Hidup	3
3. Kinerja Sosial.....	3
C. PROFIL PERUSAHAAN.....	4
1. Informasi Umum	4
2. Visi dan Misi	4
3. Skala Usaha.....	5
4. Produk, layanan kegiatan usaha	7
5. Keanggotaan pada Asosiasi	7
6. Perubahan yang bersifat signifikan	7
D. PENJELASAN DIREKSI	8
1. Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan	8
2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan.....	9
3. Strategi Pencapaian Target	10
E. TATA KELOLA BERKELANJUTAN.....	11
1. Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris	11
F. KINERJA BERKELANJUTAN.....	14
1. Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan di Internal Perseroan	14
2. Kinerja Keberlanjutan - Ekonomi.....	14
3. Kinerja Keberlanjutan - Sosial	15
4. Kinerja Keberlanjutan - Lingkungan Hidup.....	19
5. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	20
G. PENUTUP	21





LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN BERKELANJUTAN
PT. BPR NTB (Perseroda)

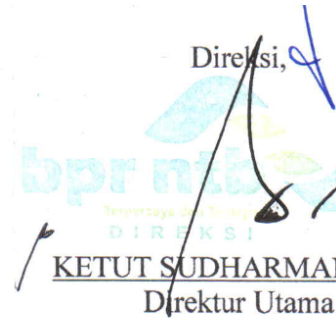
Kami selaku Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Berkelanjutan PT. BPR NTB (Perseroda) tahun 2023 telah disampaikan secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017.

Demikian Lembar Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mataram, 30 April 2024
PT. BPR NTB (Perseroda)

Dewan Komisaris,

LALU NOFIAN HADI SAPUTRA, S.Si
Komisaris Utama

Direksi,

KETUT SUDHARMANA, SP
Direktur Utama



A. STRATEGI BERKELANJUTAN

PT. BPR NTB (Perseroda) selanjutnya disebut BPR NTB atau Bank atau perusahaan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha Bank dengan bertindak dalam kerangka tanggung jawab terhadap nasabah, pegawai, pemegang saham, lingkungan serta memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan masyarakat luas.

Strategi PT. BPR NTB (Perseroda) dalam mewujudkan Keuangan Berkelanjutan mengedepankan pada 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi Bank dan pemangku kepentingan dengan berpartisipasi dalam menerapkan keuangan berkelanjutan melalui layanan produk dan jasa keuangan Bank. PT. BPR NTB (Perseroda) mengintegrasikan bisnis dengan tiga aspek tersebut melalui :

- Ekonomi: Menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan serta berpartisipasi aktif dalam membangun inklusi keuangan bagi masyarakat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik dan transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah;
- Sosial: Memberi dampak positif bagi masyarakat melalui edukasi literasi keuangan dan pemberdayaan yang berkelanjutan; dan
- Lingkungan: Menerapkan kepedulian terhadap lingkungan yang dimulai dari internal termasuk juga menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan memenuhi norma dan peraturan yang berlaku.



B. IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN

1. Kinerja Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Realisasi Desember 2021	Realisasi Desember 2022	Realisasi Desember 2023
Pendapatan Operasional	NIHIL	152.126	160.424
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	NIHIL	810.730	895.044
Kredit UMKM	NIHIL	418.265	486.293
Total Aset	NIHIL	883.104	1.002.949
Simpanan	NIHIL	577.160	680.303
a. Tabungan	NIHIL	342.015	398.926
b. Deposito	NIHIL	235.145	281.377
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	NIHIL	26.992	28.859
Produk Ramah Lingkungan	NIHIL	NIHIL	NIHIL

PT. BPR NTB (Perseroda) mulai terbentuk pada bulan April tahun 2022, sehingga data keuangan yang disajikan hanya 2 tahun terakhir.

2. Kinerja Lingkungan Hidup

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Realisasi Desember 2021	Realisasi Desember 2022	Realisasi Desember 2023
Penggunaan Listrik	NIHIL	661	690
Penggunaan Air	NIHIL	39	44

3. Kinerja Sosial

Uraian	Realisasi Desember 2021	Realisasi Desember 2022	Realisasi Desember 2023
Jumlah Pegawai	NIHIL	573 orang	540 orang
Peserta Pelatihan	NIHIL	474 orang	480 orang



C. PROFIL PERUSAHAAN

1. Informasi Umum

Nama Perusahaan	:	PT. BPR NTB (Perseroda)
Nama Inisial	:	BPR NTB
Bidang Usaha	:	Bank Perkreditan Rakyat
Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Adisucipto Kebon Roek Ampenan
Nomor Telepon	:	(0370) 641875
Situs Web	:	www.bprntb.co.id
Dasar Hukum Pendirian	:	Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat oleh Saharjo, SH.,M.Kn.,MH. Notaris Kabupaten Lombok Tengah di Praya, BPR melakukan perubahan bentuk Badan dari PD. BPR NTB menjadi PT. BPR NTB (Perseroda).
Jaringan Kantor	:	43 Kantor Cabang dan 6 Kantor Kas

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi bank perkreditan rakyat yang sehat, kontributif, tangguh dan terpercaya sebagai mitra usaha rakyat.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan prima kepada semua *stakeholder* yang didukung oleh teknologi yang handal;
- 2) Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- 3) Meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.



3. Skala Usaha

a. Total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	SATUAN	2023
Aset	Juta Rp	1.002.949
Total Kewajiban	Juta Rp	7.890
Dana Pihak ketiga	Juta Rp	680.303

b. Jumlah Karyawan

Jumlah Pegawai PT. BPR NTB (Perseroda) sampai dengan Tahun 2023, sebanyak 540 orang yang terdiri dari Pegawai Tetap 479 Orang dan Pegawai Kontrak 61 Orang.

Jumlah SDM berdasarkan jenjang Pendidikan :

- b) Sarjana (S2) : 2 Orang
- c) Sarjana (S1) : 283 Orang
- d) Diploma III (D3) : 33 Orang
- e) SLTA : 212 Orang
- f) Lainnya : 10 Orang

c. Kepemilikan Saham

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0012449.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.BPR NTB (Perseroda), Pemegang Saham Bank sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (PSP);
- 2) Pemerintah Kota Mataram;
- 3) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 4) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- 5) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- 6) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- 7) Pemerintah Kabupaten Dompu;
- 8) Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 9) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 10) Pemerintah Kabupaten Bima; dan
- 11) Pemerintah Kota Bima.

Modal dasar ditetapkan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dengan komposisi 51% dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan 49% dikuasai oleh Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat, dengan komposisi sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian		Modal Dasar		Modal Setor		Dana Setoran Modal Kewajiban	Penyertaan Modal Keseluruhan	
		%	Nominal	Nominal	%		Nominal	%
Pemda Provinsi NTB		51,00%	255.000.000.000	72.471.269.445	50,98%	6.051.131.437	78.522.400.882	51,22%
Pemda Kabupaten/Kota		49,00%	245.000.000.000	69.673.538.488	49,02%	5.114.393.950	74.787.932.438	48,78%
1	Pemkab. Sumbawa	12,45%	62.250.000.000	16.943.050.255	11,92%	1.000.000.000	17.943.050.255	11,70%
2	Pemkab. Lombok Tengah	7,03%	35.150.000.000	12.250.000.000	8,62%	0	12.250.000.000	7,99%
3	Pemkab. Dompu	8,99%	44.950.000.000	12.239.305.639	8,61%	0	12.239.305.639	7,98%
4	Pemkab. Lombok Timur	7,57%	37.850.000.000	10.305.959.404	7,25%	0	10.305.959.404	6,72%
5	Pemkab. Lombok Barat	5,09%	25.450.000.000	6.929.466.874	4,87%	750.000.000	7.679.466.874	5,01%
6	Pemkab. Bima	3,26%	16.300.000.000	5.691.055.222	4,00%	500.000.000	6.191.055.222	4,04%
7	Pemkot Mataram	2,37%	11.850.000.000	2.269.952.050	1,60%	2.364.393.950	4.634.346.000	3,02%
8	Pemkab. Sumbawa Barat	1,10%	5.500.000.000	1.500.000.000	1,06%	500.000.000	2.000.000.000	1,30%
9	Pemkot Bima	0,77%	3.850.000.000	1.044.749.044	0,73%	0	1.044.749.044	0,68%
10	Pemkab. Lombok Utara	0,37%	1.850.000.000	500.000.000	0,35%	0	500.000.000	0,33%
Total		100,00%	500.000.000.000	142.144.807.933	100,00%	11.165.525.387	153.310.333.320	100,00%

d. Wilayah Operasional

- 1) Jumlah Kantor : 50 (Lima Puluh) Kantor
- 2) Jenis Kantor :
 - 1 (satu) Kantor Pusat;
 - 43 (empat puluh tiga) Kantor Cabang; dan
 - 6 (enam) Kantor Kas

4. Produk, layanan kegiatan usaha

Produk Penyaluran Kredit	Produk Simpanan
1. Kredit Modal Kerja 2. Kredit Investasi 3. Kredit Konsumtif	1. Tabungan Sukses 2. TabunganKu 3. Tabungan Qurban 4. Simpanan Pelajar 5. Deposito

5. Keanggotaan pada Asosiasi

Nama Organisasi	Lingkup	Peran dan Kontribusi Perusahaan	Periode
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)	Organisasi bagi industri perbankan nasional	Sebagai Anggota	Sampai Sekarang
Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida)	Organisasi bagi industri BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia	Sebagai Anggota	Sampai Sekarang

6. Perubahan yang bersifat signifikan

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat oleh Saharjo, SH.,M.Kn.,MH. Notaris Kabupaten Lombok Tengah di Praya, BPR melakukan perubahan bentuk Badan dari PD. BPR NTB menjadi PT. BPR NTB (Perseroda). Pada tanggal 15 Februari 2023 Bank telah mendapatkan persetujuan atas perubahan tersebut melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0012449.AH.01.01.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BPR NTB (Perseroda).

D. PENJELASAN DIREKSI

1. Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan

a. Nilai keberlanjutan

Tahun 2023 merupakan tahun pertama PT. BPR NTB (Perseroda) menyusun Rencana Aksi keuangan Berkelanjutan. Perubahan model bisnis dan adaptasi pada cara kerja yang baru merupakan sesuatu yang bernilai untuk dapat bertahan di masa pemulihan ini. Dalam hal ini disadari pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Oleh sebab itu prinsip-prinsip berkelanjutan harus ditanamkan untuk membangun Sektor Jasa Keuangan yang bertanggungjawab. PT. BPR NTB (Perseroda) sebagai bagian dari Sektor Jasa Keuangan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dengan menyelaraskan pada kepentingan sosial dan lingkungan hidup serta tata kelola guna mencapai tujuan yang baik.

b. Respon terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan turut serta berpartisipasi dalam mendukung implementasi SDG (*Sustainable Development Goals*) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. PT. BPR NTB (Perseroda) sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia memiliki kesadaran penuh akan pentingnya memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan kegiatan usaha PT. BPR NTB (Perseroda) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.

c. Respon Terhadap Isu Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

UMKM memiliki arti penting bagi perekonomian Indonesia dan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2023, PT. BPR NTB (Perseroda) mulai mengembangkan berbagai aplikasi pendukung manajemen yang dapat mengurangi dampak penggunaan kertas (*Papperless*).



d. Komitmen dalam pencapaian penerapan keuangan Berkelanjutan

Selain itu, PT. BPR NTB (Perseroda) juga terus berusaha untuk berkembang dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan menyelaraskan dengan kesadaran atas dampak lingkungan. PT. BPR NTB (Perseroda) telah mengembangkan berbagai aplikasi pendukung manajemen yang dapat mengurangi dampak penggunaan kertas (*Papperless*) serta memberikan efisiensi dalam beraktivitas. Komitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan pada akhirnya memberikan nilai tambah jangka panjang bagi PT. BPR NTB (Perseroda).

e. Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Saat ini PT. BPR NTB (Perseroda) belum dapat melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan, dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun pertama PT.BPR NTB (Perseroda) menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk tahun buku 2024.

f. Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan adalah perlunya pemahaman akan pemenuhan aspek LST (lingkungan, sosial, dan tata kelola) baik dari sisi internal Bank maupun dari sisi nasabah.

2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam mengimplementasikan program keuangan berkelanjutan ini juga, telah dibangun pola pikir keuangan berkelanjutan pada seluruh pegawai PT. BPR NTB (Perseroda) yaitu dengan menjaga lingkungan hidup di area internal PT.BPR NTB (Perseroda) yaitu dengan melakukan pengembangan Aplikasi pendukung manajemen yang dapat mengurangi dampak penggunaan kertas (*papperless*). Tahun 2024 merupakan tahun pertama PT. BPR NTB (Perseroda) menerapkan program keuangan berkelanjutan. Berbagai tantangan dihadapi untuk menerapkan keuangan berkelanjutan diantaranya yaitu masih terbatasnya pemahaman jajaran internal maupun pemangku kepentingan terhadap konsep keuangan berkelanjutan sehingga diperlukan adanya adaptasi dan pengenalan konsep keuangan berkelanjutan secara bertahap.



3. Strategi Pencapaian Target

a. Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Untuk mencapai target kinerja keuangan berkelanjutan di tahun 2023 ini, PT.BPR NTB (Perseroda) menerapkan strategi, antara lain dengan menanamkan pemahaman keuangan berkelanjutan pada seluruh pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi serta pemantauan.

b. Pemanfaatan Peluang

Setiap tantangan tentunya membuka peluang yang dapat dimanfaatkan. PT. BPR NTB (Perseroda) memahami bahwa aspek Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (LST) di dunia industri tidak seragam karena setiap industri memiliki ciri khas masing-masing. Oleh sebab itu, PT. BPR NTB (Perseroda) terus meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pegawai perihal LST guna mengurangi kesenjangan pemahaman, dan akan senantiasa berproses bersama dengan debitur untuk menuju penerapan aspek LST lebih baik.



E. TATA KELOLA BERKELANJUTAN

1. Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris

Penerapan tata kelola berkelanjutan PT. BPR NTB (Perseroda) didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hingga saat ini, PT. BPR NTB (Perseroda) belum memiliki unit khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan keuangan keberlanjutan di lingkup Bank. Berdasarkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan berada pada organ tata kelola yaitu Dewan Komisaris, Direksi serta unit bisnis dan operasional. Dalam hal ini, Direksi melakukan tinjauan dan menyusun atas RAKB. Selanjutnya RAKB tersebut dilaporkan dan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan.

Tugas Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan untuk memastikan arah pengelolaan PT. BPR NTB (Perseroda) telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya untuk pengawasan penerapan Keuangan Berkelanjutan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Terkait dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang diajukan oleh Direksi.

b. Direksi

Direksi menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan melakukan pengawasan atas implementasi Keuangan Berkelanjutan. Dalam hal rencana aksi tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan, Direksi akan meninjau kembali keseluruhan rencana serta program tersebut dengan tetap memperhatikan strategi PT. BPR NTB (Perseroda).



c. **Penanggungjawab keuangan berkelanjutan**

Unit kerja yang menjadi pelaksana dalam pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan adalah unit bisnis yang didukung oleh teknologi dalam persiapan infrastruktur perbankan digital yaitu dengan:

- Bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk membangun dan menerapkan budaya keuangan berkelanjutan dalam berbagai aspek organisasi; dan
- Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan sumber daya manusia untuk menerapkan keuangan berkelanjutan.

Pengembangan Kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan PT. BPR NTB (Perseroda) meyakini Aksi Keuangan Berkelanjutan dapat terwujud jika insan pelaku memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan. Oleh sebab itu manajemen menilai penting untuk mendorong pengembangan SDM.

d. **Peranan Pemangku Kepentingan**

Keterlibatan dan peran seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan usaha merupakan bagian yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang dan mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk mempengaruhi jalannya operasional atau terkena dampak dari perusahaan seperti investor/ pemegang saham, regulator, pegawai, mitra bisnis, komunitas/asosiasi, konsumen/pelanggan, masyarakat, dan lain-lain. Secara strategis, pemangku kepentingan turut mengembangkan dan mempengaruhi kinerja PT. BPR NTB (Perseroda). Oleh karena itu, senantiasa berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.



e. **Permasalahan yang Dihadapi, Perkembangan, dan Pengaruh terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Dalam usaha penerapan Keuangan Berkelanjutan, beberapa tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

- Ketidakpastian pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum yang dapat berdampak kepada bisnis perbankan; dan
- Keterbatasan pengetahuan pegawai terkait prinsip dan penerapan Keuangan Berkelanjutan.



F. KINERJA BERKELANJUTAN

1. Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan di Internal Perseroan

Pembangunan budaya Aksi Keuangan Berkelanjutan, dilakukan secara berkesinambungan diantaranya:

- Menanamkan Visi, Misi, dan Nilai-nilai perusahaan yang mendorong performa aksi;
- Menanamkan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan pemberdayaan lingkungan terutama dalam lingkungan sekitar internal bank; dan
- Pemberdayaan tenaga kerja masyarakat sekitar kantor cabang.

2. Kinerja Keberlanjutan - Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi (dalam juta rp):.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi Desember 2022	Realisasi Desember 2023	Target Desember 2023	Penca- paian	Pertum- buhan
Total Aset	883.104	1.002.949	1.004.295	99,87%	13,57%
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	810.730	895.044	920.178	97,27%	10,40%
Simpanan	577.160	680.302	676.132	100,62%	17,87%
a. Tabungan	342.015	398.926	410.418	97,20%	16,64%
b. Deposito	235.145	281.377	265.714	105,89%	19,66%
Simpanan dari Bank Lain	25.990	30.978	37.487	82,64%	19,20%
Pendapatan Operasional	152.126	160.424	174.310	92,03%	5,46%
Beban Operasional	119.790	124.375	135.926	91,50%	3,83%
Pendapatan Non Operasional	2.561	2.681	1.718	156,03%	4,67%
Beban Non Operasional	1.926	1.703	2.293	74,29%	-11,55%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	32.972	37.026	37.810	97,93%	12,30%
Taksiran Pajak Penghasilan	5.980	8.167	8.318	98,19%	36,57%
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	26.992	28.859	29.492	97,86%	6,92%

3. Kinerja Keberlanjutan - Sosial

a. Komitmen Memberikan Layanan Atas Produk Dan Atau Jasa Yang Setara Kepada Konsumen

PT. BPR NTB (Perseroda) berkomitmen untuk memberikan layanan produk dan/atau jasa yang transparan terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya – biaya serta syarat dan ketentuan yang melekat pada produk dan/atau layanan mencakup produk yang diterbitkan oleh Bank.

Penerapan Transparansi Informasi Produk dan/ atau Layanan Bank diantaranya:

- 1) Menyampaikan informasi atas produk dan/atau layanan yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan pada saat :
 - a. Memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. Membuat perjanjian dengan konsumen; dan
 - c. Penyampaian informasi melalui berbagai media.
- 2) Menggunakan istilah serta kalimat yang mudah dipahami konsumen dalam setiap dokumen yang memuat hak dan kewajiban konsumen, sehingga dapat digunakan konsumen untuk mengambil keputusan, dan memuat persyaratan serta dapat mengikat konsumen secara hukum; dan
- 3) Menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
 - b. Syarat dan ketentuan.

Seluruh informasi produk dan layanan jasa keuangan dapat diakses oleh seluruh nasabah melalui situs web atau datang langsung ke kantor cabang.

b. Aspek Ketenagakerjaan

PT. BPR NTB (Perseroda) berupaya menerapkan kesetaraan dalam memberikan kesempatan bekerja dan menghindari pemberdayaan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang melanggar HAM dengan tidak memperdayakan tenaga kerja paksa dan tenaga kerja di bawah umur dengan merekrut calon pegawai minimum berusia 21 tahun saat diterima sebagai pegawai.

1) Persentase Remunerasi Pegawai Tetap Di Tingkat Terendah Terhadap Upah Minimum Regional

Remunerasi kepada pegawai diberikan sebagai penghargaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Pemberian remunerasi tidak didasarkan pada perbedaan gender, suku, ras, maupun agama. Pemberian remunerasi disesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta ketentuan upah yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Adapun bentuk remunerasi yang diberikan adalah gaji dan tunjangan. Besaran gaji pokok pegawai pada level terendah di PT. BPR NTB (Perseroda) minimal diberikan sejumlah Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2) Tunjangan Pegawai

Jenis Tunjangan	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak
Tunjangan Hari Raya	✓	✓
Tunjangan Jabatan	✓	✗

3) Lingkungan Bekerja Yang Layak Dan Aman

PT. BPR NTB (Perseroda) menyadari pentingnya lingkungan bekerja yang layak dan aman diantaranya:

- a) Setiap gedung kantor PT. BPR NTB (Perseroda) sudah dilengkapi dengan perangkat keselamatan kerja seperti APAR;
- b) Menerapkan kebijakan BCP (*Business Continuity Plan*) untuk memastikan adanya antisipasi terhadap kejadian-kejadian darurat demi mempertahankan kelangsungan seluruh aktivitas bisnis dan operasional, menjamin kesehatan dan keselamatan pegawai, nasabah dan aset Bank, termasuk pemangku kepentingan lain yang berada di area operasional Bank; dan
- c) Memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, baik melalui skema BPJS kesehatan. Selain itu, disediakan Jaminan Kecelakaan Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk menanggung risiko kecelakaan kerja yang dialami pegawai.

4) Pelatihan Dan Pengembangan Kemampuan Pegawai

PT. BPR NTB (Perseroda) senantiasa berupaya untuk menciptakan SDM yang unggul melalui pemberian berbagai jenis pelatihan. Jenis materi-materi pendidikan maupun pelatihan mencakup pengetahuan produk dan jasa, *soft skill* seperti kepemimpinan, dan komunikasi yang baik, *technical skill* untuk menjalankan sistem-sistem yang digunakan dalam perbankan. Pelatihan diadakan secara tatap muka maupun virtual. Metode yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi pegawai di antaranya melalui *webinar*, pelatihan, serta *coaching* secara langsung di tempat kerja.

PT. BPR NTB (Perseroda) melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelatihan yang kemudian hasil evaluasinya dilaporkan ke masing-masing unit kerja yang menjadi program owner agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut secara periodik.



c. Aspek Masyarakat

1) Informasi Kegiatan Atau Wilayah Operasional

Pada akhir tahun 2023, PT. BPR NTB (Perseroda) tercatat memiliki 1 kantor pusat, 43 kantor cabang dan 6 Kantor Kas yang tersebar di provinsi Nusa Tenggara Barat. PT. BPR NTB (Perseroda) berupaya memberikan kenyamanan (*convenience*) dalam melakukan aktivitas perbankan dan memberikan dampak positif, sehingga memberikan nilai tambah dalam menjawab kebutuhan finansial nasabah.

2) Mekanisme Pengaduan Masyarakat Dan Jumlah Pengaduan Yang Diterima Dan Ditindaklanjuti

PT. BPR NTB (Perseroda) telah memiliki prosedur dalam mekanisme pengaduan masyarakat dan informasi alur proses pengaduan tersebut juga tersedia pada media informasi di setiap kantor cabang serta menerima pengaduan nasabah dengan datang langsung ke kantor cabang terdekat.

Jenis Tunjangan	2022	2023
Jumlah pengaduan	3	4
Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti	3	4

3) TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) Yang Dikaitkan Dengan Dukungan Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai bentuk dukungan pemberdayaan masyarakat lokal, PT. BPR NTB (Perseroda) telah menyalurkan Dana CSR di tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 65 tahun 2023 tentang Pedoman pelaksanaan dan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. BPR NTB (Perseroda) sebesar Rp842.171.850. Penyaluran Dana CSR tersebut disalurkan ke berbagai bidang kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

- Penyaluran Dana CSR Bidang Pendidikan sebesar Rp 168.598.500;
- Penyaluran Dana CSR Bidang Kesehatan sebesar Rp 15.880.000;
- Penyaluran Dana CSR Bidang Keagamaan sebesar Rp 467.993.350;
- Penyaluran Dana CSR Bidang Olahraga sebesar Rp 62.000.000;
- Penyaluran Dana CSR Bidang Kesejahteraan Sosial sebesar Rp49.300.000;

- f) Penyaluran Dana CSR Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan Dan Perikanan sebesar Rp 20.000.000;
- g) Penyaluran Dana CSR Bidang Bencana Alam sebesar Rp 10.000.000; dan
- h) Penyaluran Dana CSR Bidang Lainnya sebesar Rp 48.400.000.

4. Kinerja Keberlanjutan - Lingkungan Hidup

a. Penggunaan Material Daur Ulang dan Ramah Lingkungan

PT. BPR NTB (Perseroda) belum memanfaatkan material daur ulang untuk kegiatan operasional utama Bank. Namun demikian, untuk mendukung penggunaan material daur ulang telah dibedakan sampah kertas dan non kertas. Selanjutnya kertas tersebut dicacah, dikumpulkan dan di berikan ke pihak penerima kertas bekas untuk didaur ulang. Selain itu juga digunakan material ramah lingkungan diantaranya penggunaan lampu LED pada gedung-gedung kantor PT. BPR NTB (Perseroda).

b. Penggunaan energi

PT. BPR NTB (Perseroda) mengelola pemakaian energi di lingkungan Bank dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan sekaligus sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim.

- 1) Sejumlah inisiatif dalam mengurangi pemakaian listrik yaitu diantaranya:
 - a) Mengatur jadwal operasional AC, lampu dan lift secara bertahap; dan
 - b) Penggantian lampu LED;
- 2) Mengimplementasikan penggunaan kertas dari gramasi 80 menjadi 75; dan
- 3) Menghemat penggunaan air.

5. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Dalam penyediaan layanan perbankan, integritas data dan kerahasiaan informasi dijaga, dilindungi dari gangguan internal dan eksternal. Oleh karena itu, dalam penyediaan layanan perbankan perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip pengendalian, pengamanan data dan transaksi nasabah, serta perlindungan data nasabah yang memadai.

Dalam inovasi dan pengembangan produk dan atau jasa harus menjalani serangkaian pengujian secara internal. Rencana produk tersebut juga dilaporkan ke regulator terkait seperti OJK dan atau Bank Indonesia (BI). Kemudian, berdasarkan hasil analisa dan kajian dalam hal termasuk dalam kategori produk baru maka persetujuan berupa notifikasi atau perizinan dari OJK dan atau BI wajib diperoleh sebelum dilakukan peluncuran produk.

Seluruh produk dan atau jasa keuangan dan fitur-fitur yang diluncurkan sudah dievaluasi keamanannya bagi nasabah.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Berkelanjutan Tahun Buku 2023 ini disusun yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Mataram, April 2024
PT. BPR NTB (Perseroda)

Menyetujui
Dewan Komisaris,



bpr ntb
Terpercaya dan Terdepan
DEWAN KOMISARIS

LALU NOFIAN HADI SAPUTRA, S.Si
Komisaris Utama

Disusun oleh
Direksi,



bpr ntb
Terpercaya dan Terdepan
DIREKSI

KETUT/SUDHARMANA, SP
Direktur Utama

